

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERIZINAN REKLAME PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH WILAYAH JAKARTA BARAT II

ADE KURNIAWAN¹, ISTIQOMAH²

ade.kurniawan@ibm.ac.id¹ , istiqomah.moengin@gmail.com²

Program Studi Teknik Informatika Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi¹
STIMIK Perbanas²

ABSTRACT

The implementation of regional government and regional development in its implementation very much dependent of the regional genuine revenue (PAD), while the largest PAD of DKI Jakarta province is come from local taxes. Thereby the implementation of PAD reception need to be optimized. Looking for sources of the new funds in the reform it is very problematic because new charges should align with an increase in services and not burden the public and the business world. The safest way is to optimize existing tax collection, one of them potentially is an advertisement licensing which includes advertisement tax. In the licensing process is required an information system so that the licensing process may go in good and smooth. After conducted research on an existing system, there are still several weaknesses among them are operational service administration and calculations were done manually, the process of data storage/files and for finding data required information not arrayed or not well integrated, and reporting data information is still limited so that takes long time to prepare. In the journal was discussed about design of new information system that in order to minimize that several weaknesses. The use of a computer in the new information system is expected to shorten the time needed to data processing and preparing the report.

Keywords: PAD, Sudin Penda, SKPD, SIPR, SPPR.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pemerintah daerah yaitu kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semaksimal mungkin. Untuk pemerintah DKI Jakarta, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang dominan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Peranan PAD terhadap penerimaan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan

peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, sehingga tuntutan perbaikan dalam segala bidang manajemen, sistem dan sumber daya manusia secara terus menerus harus ditingkatkan.

Suku Dinas Pendapatan Daerah (Sudin Penda) wilayah Jakarta Barat II mempunyai beberapa sumber untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, salah satunya adalah melalui Pajak Perizinan Reklame. Sudin Penda dalam tugasnya dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya lebih baik, dengan harapan jumlah pajak daerah yang diterima terus bertambah. Namun peningkatan jumlah itu harus dilakukan dengan menerapkan azas 'adil dan merata' sebagai landasan pelaksanaan kebijaksanaan pemungutan pajak.

Proses perizinan reklame yang dilakukan meliputi pengadministrasian berkas, perhitungan pajak reklame, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Izin Perizinan Reklame (SIPR). Sistem yang dipergunakan sampai saat ini masih dengan cara manual. Baik dalam pencatatan, penetapan, maupun pengolahan data-datanya. Aplikasi yang digunakan berupa *Micrsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Dengan belum adanya sistem manajemen database yang dapat menangani proses perizinan reklame dari awal hingga akhir, sehingga proses perizinan reklame menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan operasional administrasi dan perhitungan pajak dilakukan secara manual, sehingga memperlambat proses perizinan reklame
- 2) Lamanya proses pencarian data dan informasi yang dibutuhkan, karena media penyimpanan yang digunakan masih berupa buku dan arsip
- 3) Terdapat kesulitan dalam memperbaiki atau mengubah data jika terjadi kesalahan dalam data perizinan
- 4) Pelaporan data informasi masih terbatas dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam persiapannya

Mengingat hal-hal tersebut di atas, penulis mengusulkan suatu sistem rancangan program aplikasi yang dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah-masalah yang diuraikan tersebut di atas. Diharapkan dengan adanya program aplikasi komputer ini dapat mengurangi permasalahan dalam

pelayanan proses perizinan reklame. Untuk itu, penulis mengajukan jurnal yang berjudul: "**Sistim Informasi Manajemen Perizinan Reklame Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Jakarta Barat II**"

2. METODE

Pengertian Sistem Informasi

Pemakaian sistem informasi dengan menggunakan komputer pada saat ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang. Sebagian besar orang menyadari bahwa sistem informasi dengan menggunakan komputer memberikan hasil yang lebih akurat, sehingga memudahkan dalam melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Jogiyanto (2001:11), sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, mendukung operasi dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Davis (1999:28) mendefinisikan, sistem informasi adalah suatu sistem yang mengelola data dari bentuk tidak berguna menjadi berguna atau informasi bagi penerimanya. Berdasarkan pengertian sistem informasi tersebut, diambil kesimpulan bahwa informasi sangat penting dalam membangun suatu sistem yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk merencanakan sesuatu.

Pengertian Sistem Informasi Manajemen

Menurut Barry E. Cushing seperti yang dikutip Jogiyanto (2001:14), mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan

pengendalian. Menurut Kendall & Kendall (2003:3), sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang sudah terkomputerisasi yang bekerja karena adanya interaksi antara manusia dan komputer. Davis (1999:3), sistem informasi manajemen mendefinisikan sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu (*integrated*), untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi.

Sistem-sistem tersebut diatur dengan sebuah cara yang terstruktur (prosedur) dan juga tidak lepas dari komponen-komponen lainnya, seperti:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras adalah bentuk fisik yang terlihat dari sebuah komputer berikut perangkat fisik yang mendukung. Perangkat keras dibagi menjadi dua golongan, yaitu perangkat keras masukan dan perangkat keras keluaran. Melalui perangkat keras inilah manusia memasukkan semua kegiatan ke dalam komputer, baik data maupun instruksi dan melihat hasil akhir dari proses yang dilakukan oleh komputer.

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak merupakan sekumpulan perintah yang diberikan kepada perangkat keras atau mesin komputer. Perintah-perintah ini dibuat oleh manusia untuk mengaktifkan perangkat keras. Dengan kata lain, sebuah komputer dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan si pemakai dengan bantuan perangkat lunak.

Analisis Proses

Ada 5 (lima) *entity* luar di dalam kegiatan perizinan penyelenggaraan reklame, yaitu wajib pajak, Bagian P3D, Bagian Pemeriksaan (P2), Bagian Penetapan, dan Kepala Sudin Penda

Wilayah Jakarta Barat II. Penulis menjelaskan proses dimulai dari saat wajib pajak menyerahkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame (SPPR) sampai dengan diterbitkannya SKPD dan SIPR.

a. Deskripsi Proses

1) Pendaftaran

- a) Wajib Pajak mengajukan SPPR ke loket P3D, kemudian petugas P3D melakukan pengecekan persyaratan SPPR sesuai peraturan dan ketentuan penyelenggaraan reklame. Apabila persyaratan tidak lengkap, maka SPPR dikembalikan kepada wajib pajak dan memberitahukan wajib pajak untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi.
- b) Bila persyaratan telah terpenuhi, petugas Bagian P3D meminta persetujuan lokasi kepada Kepala Sudin.
- c) Bila disetujui, maka dibuatkan resi pendaftaran untuk wajib pajak dan membuat lembar pengantar SPPR untuk pendistribusian SPPR ke bagian atau seksi lainnya/ proses lebih lanjut.

2) Penerbitan SKPD

- a) Petugas P3D menyeleksi SPPR, SPPR baru diteruskan ke P2, sedangkan SPPR perpanjangan langsung diteruskan ke Bagian Penetapan untuk

- dibuatkan lembar nota perhitungan pajak.
- b) Petugas P2 mengecek lokasi pemasangan reklame untuk memastikan reklame sudah terpasang atau belum.
 - c) Setelah pengecekan, petugas P2 membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 - d) Kemudian berkas SPPR baru diteruskan ke Bagian Penetapan untuk ditetapkan pajak dengan membuat lembar nota perhitungan pajak sebagai acuan pembuatan SKPD. Dokumen permohonan diteruskan kembali ke Bagian P3D.
 - e) Pada Bagian P3D, petugas membuat SKPD sesuai dengan dokumen permohonan, kemudian SKPD dicetak. Setelah dicetak petugas Bagian P3D meminta pengesahan Kepala Sudin Penda Wilayah Jakarta Barat II.
 - f) Setelah SKPD ditandatangani oleh Kepala Sudin, SKPD dicatat pada buku induk reklame terlebih dahulu sebelum diberikan kepada wajib pajak, wajib pajak menyerahkan bukti resi pendaftaran untuk mengambil SKPD.

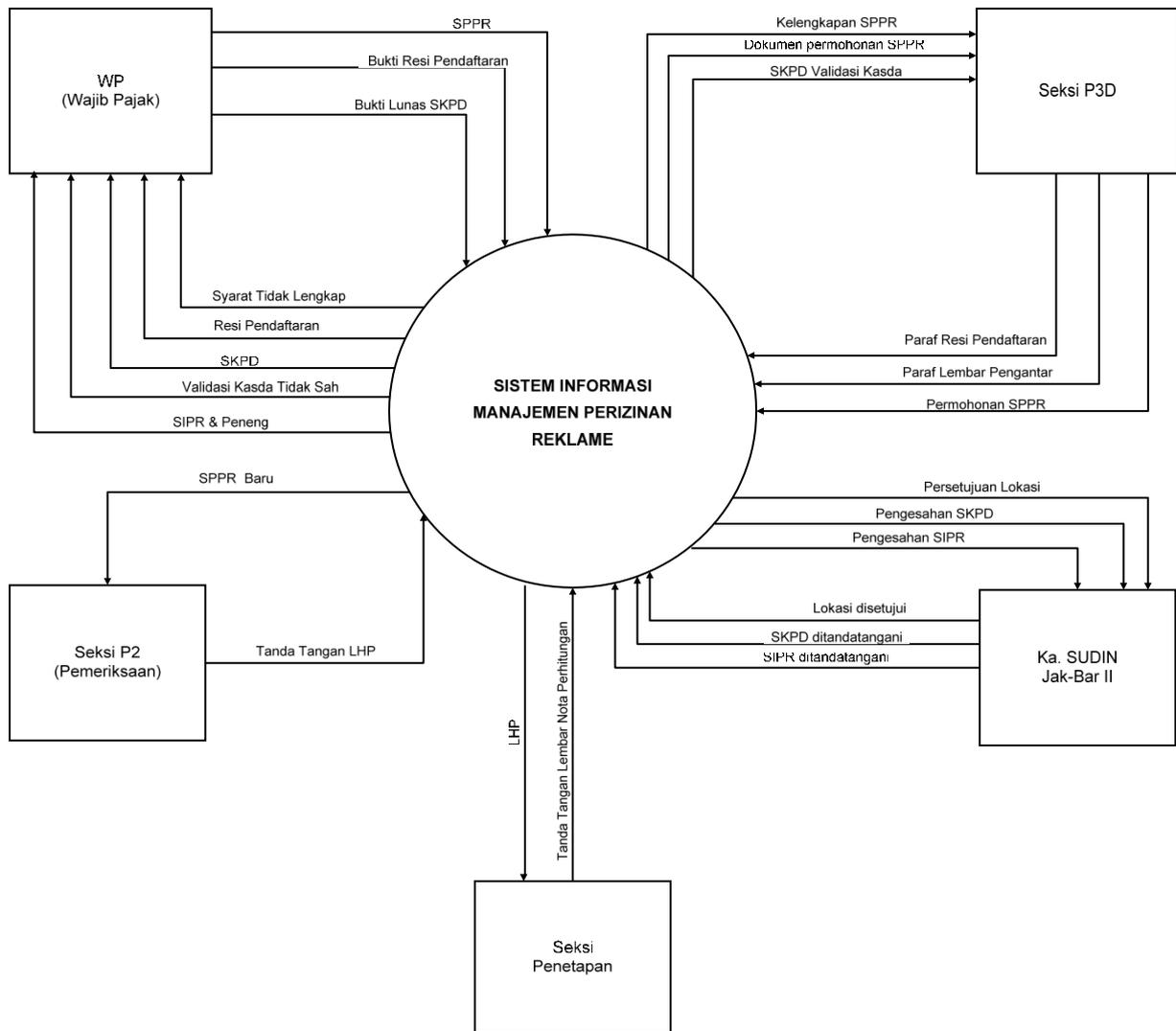
3) Penerbitan SIPR

- a) Wajib pajak menyerahkan bukti lunas SKPD ke loket Bagian P3D, kemudian petugas Bagian P3D mengecek jumlah pembayaran sesuai dengan pajak yang harus dibayar dan memastikan keaslian teraan validasi Kasda.
- b) Jika validasi Kas Daerah (Kasda) sah, petugas mencatat pembayaran SKPD pada Buku Induk Reklame.
- c) Setelah pembayaran dicatat, petugas menerbitkan SIPR dan memasukkan nomor seri peneng yang tertera pada peneng reklame. Setelah SIPR dicetak, petugas Bagian P3D minta pengesahan Kepala Sudin.
- d) Setelah ditandatangani Kepala Sudin, petugas Bagian P3D mencatat data SIPR di buku induk reklame, kemudian menyerahkan SIPR dan Peneng pada wajib pajak. Dokumen permohonan yang telah selesai, diarsipkan pada berkas pendaftaran per bulan.

b. Diagram Alir Data/Data Flow Diagram (DFD)

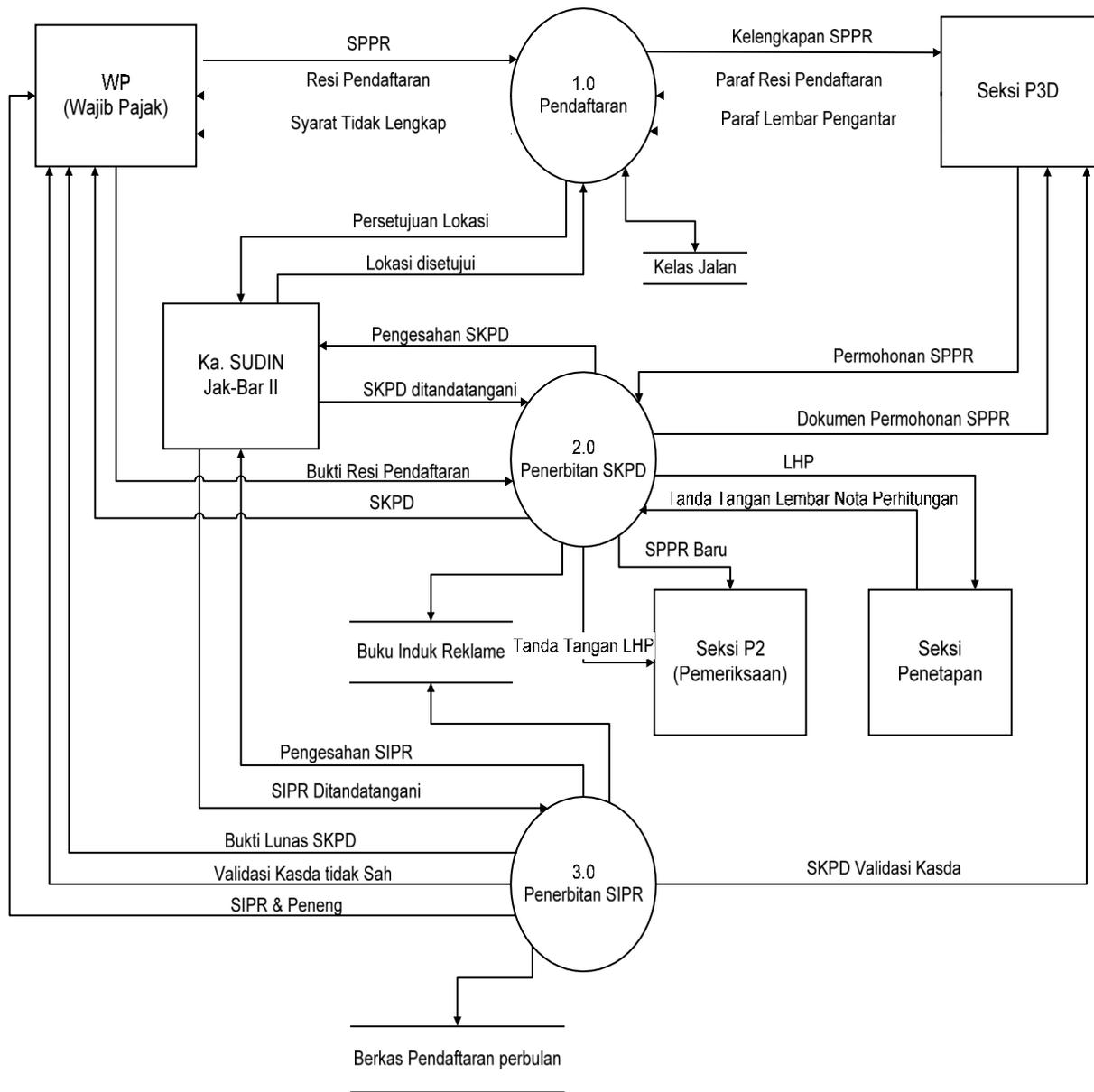
Proses yang dilakukan dan aliran-aliran data yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Perizinan Reklame digambarkan dalam diagram-diagram aliran data sebagai berikut:

1. Diagram Konteks



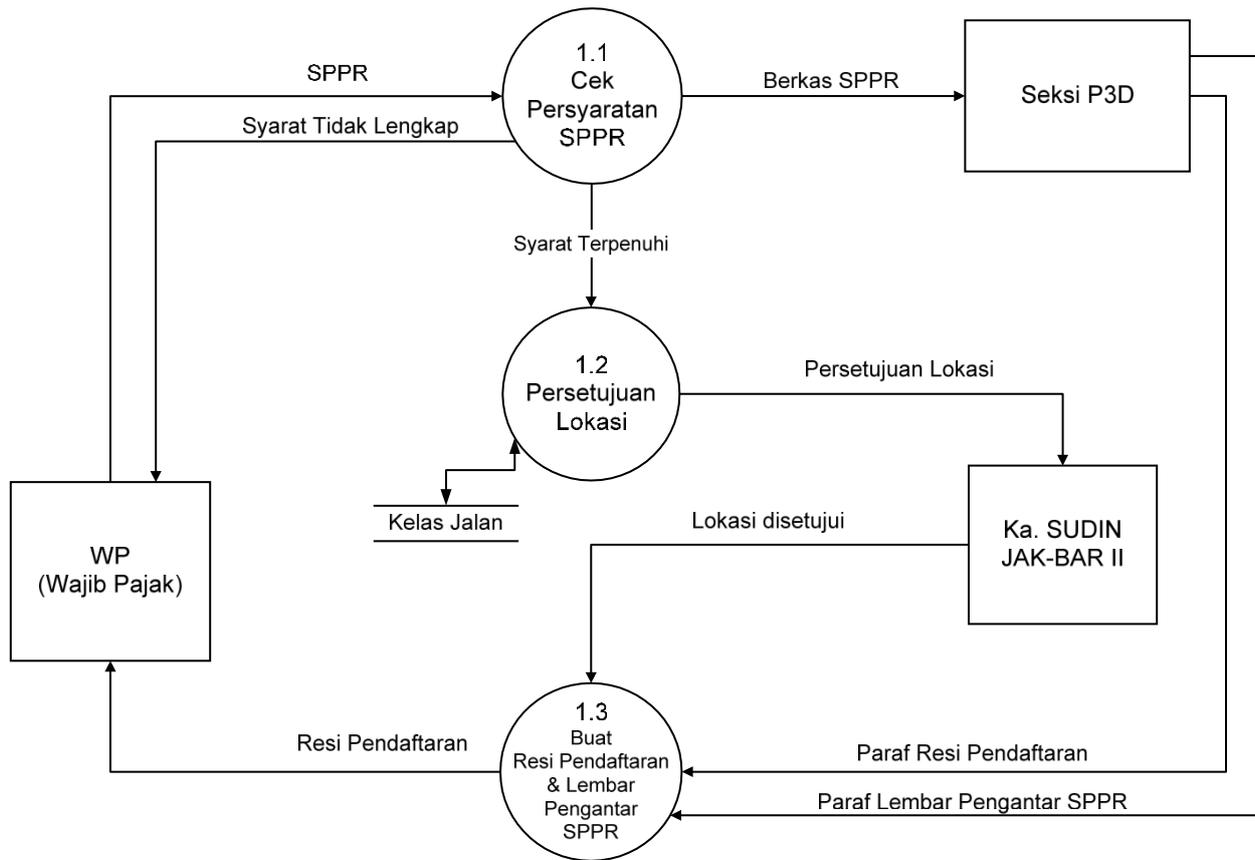
Gambar 3.2. Diagram Konteks Sistem Berjalan

2. Diagram Nol

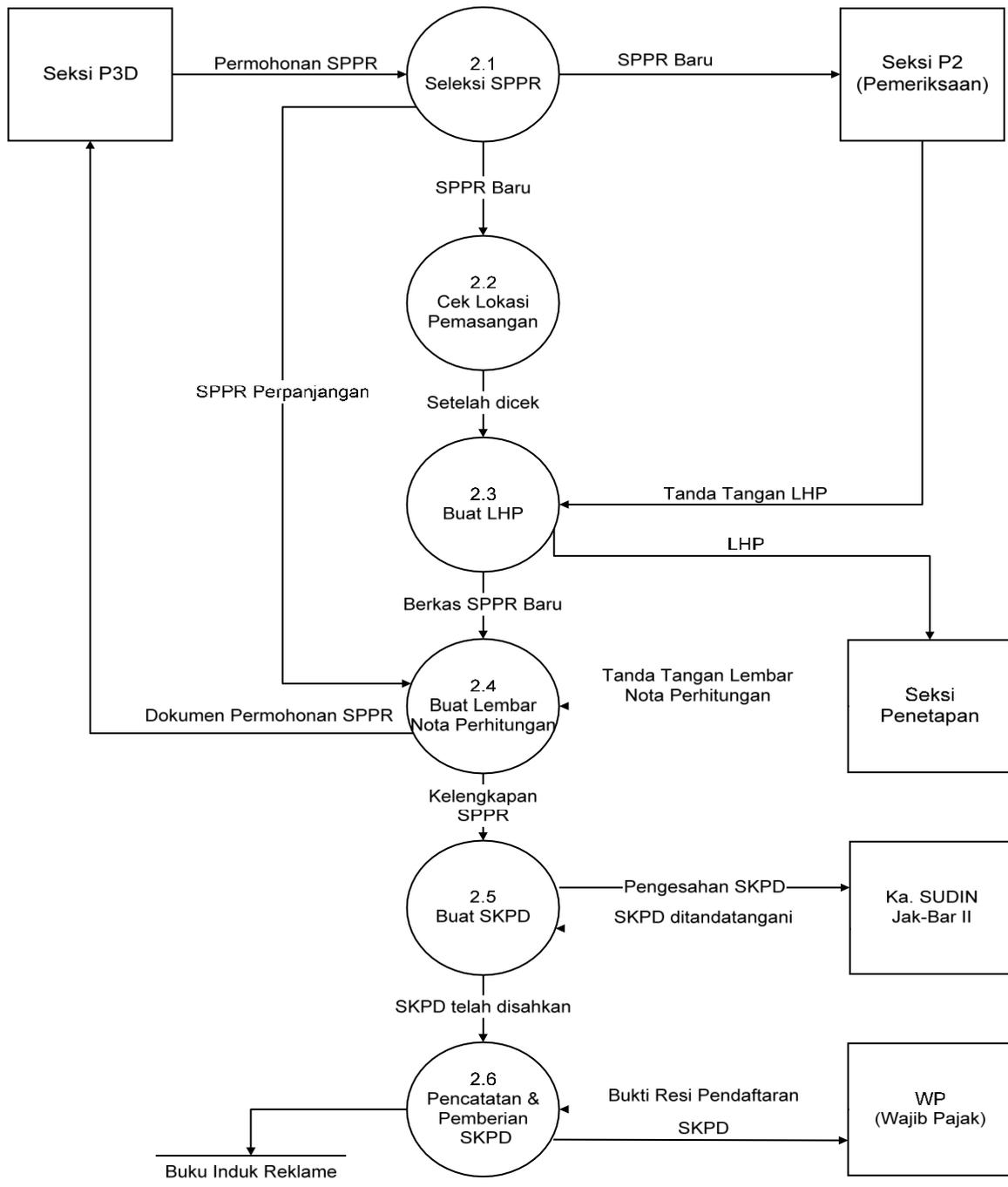


Gambar 3.3. Diagram Nol Sistem Berjalan

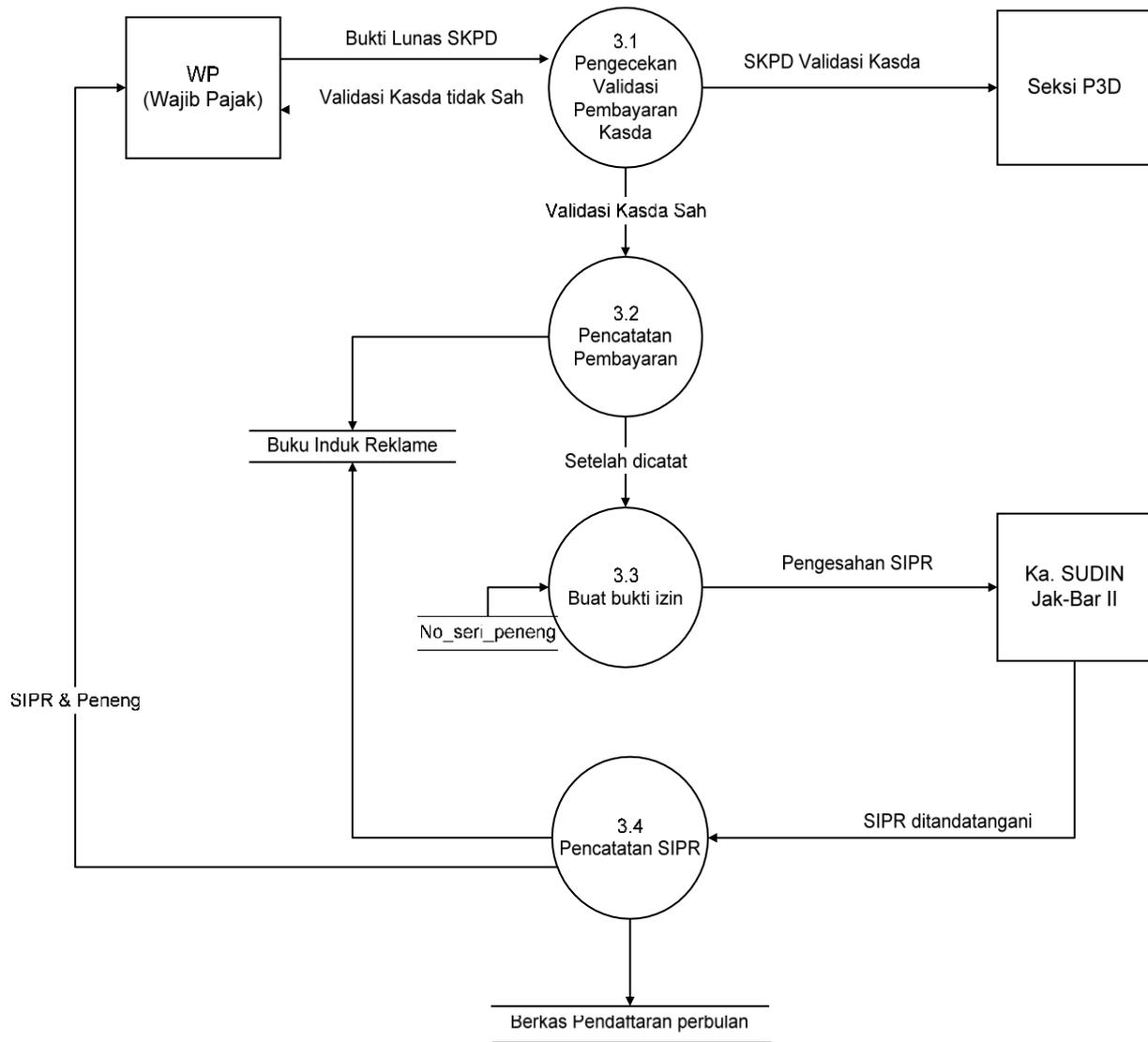
3. Diagram Rinci



Gambar 3.4. Diagram Rinci Proses Satu Sistem Berjalan



Gambar 3.5 Diagram Rinci Proses Dua Sistem Berjalan



Gambar 3.6 Diagram Rinci Proses Tiga Sistem Berjalan

Hasil Analisis

Tujuan analisis permasalahan di sini adalah untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi pada Sistem Informasi Perizinan Reklame Sudin Penda Wilayah Jakarta Barat II. Penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu antara lain:

- 1) Proses pelayanan perizinan reklame mulai dari proses penerbitan SKPD sampai dengan proses penerbitan

izin berjalan dengan lambat, karena masih dikerjakan secara manual.

- 2) Bila wajib pajak tidak membawa atau hilang SKPD/SIPR tahun sebelumnya, maka pencarian data wajib pajak memerlukan waktu yang relatif lama, karena pencarian masih bersifat manual.
- 3) Masih terdapat kesulitan dalam memperbaiki atau mengubah data, jika terjadi kesalahan pada data

perizinan, disebabkan kurangnya ketelitian petugas (*human error*).

- 4) Laporan yang dibutuhkan oleh Kasudin sehubungan dengan penerimaan reklame disajikan dalam tempo yang cukup lama (tidak *real time*, saat diperlukan saat itu juga informasi disajikan).
- 5) Surat pemberitahuan masa berlaku izin untuk segera memperpanjang pajak reklame belum efektif, karena masih menggunakan cara manual.

Alternatif Penyelesaian

Dari analisis yang dilakukan, maka penulis mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang kini terjadi, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mempermudah dan mempercepat proses penerbitan SKPD dan SIPR.
- 2) Mempermudah proses pencarian data wajib pajak yang akan melakukan perpanjangan reklame sehingga wajib pajak yang tidak membawa SKPD/ SIPR tahun sebelumnya masih dapat dilayani.
- 3) Menyajikan informasi dengan tingkat kesalahan serendah mungkin guna menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan (*human error*).
- 4) Komputer dapat membantu meningkatkan ketelitian dalam proses pemasukan data serta dalam proses penyusunan laporan.
- 5) Memberikan laporan yang cepat dengan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Menyajikan surat pemberitahuan telah habis masa izin dan surat pemberitahuan akan habis masa izin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dengan diskripsi yang jelas. Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar) dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan, dan implikasi dari temuan.

Pemecahan Masalah yang Diusulkan

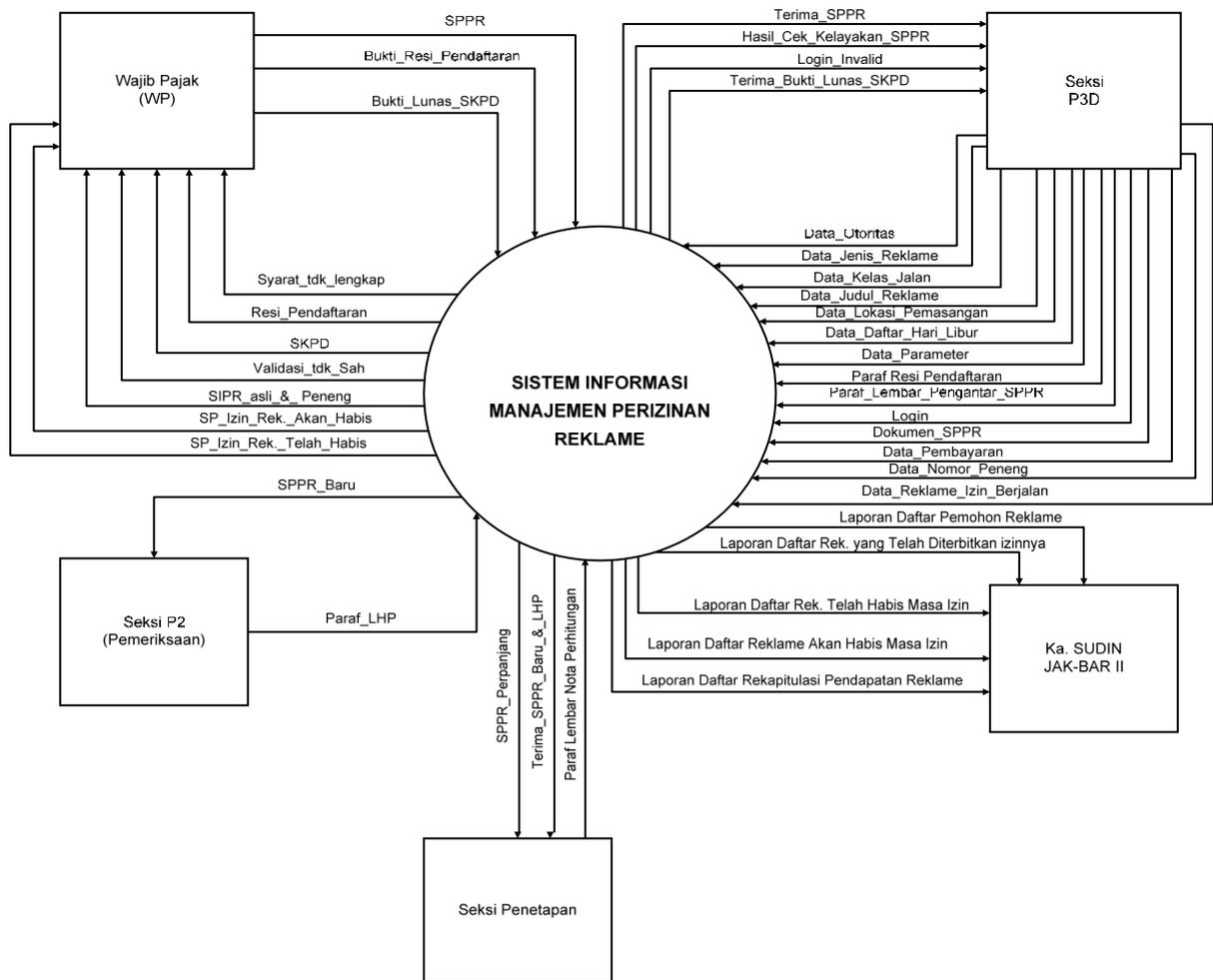
Setelah mempelajari dan menganalisis sistem yang sedang berjalan secara umum, maka disimpulkan bahwa perancangan sistem pengolahan data yang baru dengan menggunakan bantuan komputer bertujuan agar dapat mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada pada sistem yang sedang berjalan. Perancangan sistem ini dimaksudkan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Membantu mempercepat dan mempermudah pengolahan data dan pembuatan laporan.
2. Membantu mengoptimalkan kinerja pelayanan izin reklame pada Sudin Penda Jakarta Barat II.
3. Meningkatkan keteraturan penyimpanan data penyelenggaraan perizinan reklame.
4. Meningkatkan keamanan data.

Rancangan Usulan Perbaikan Diagram Arus Data

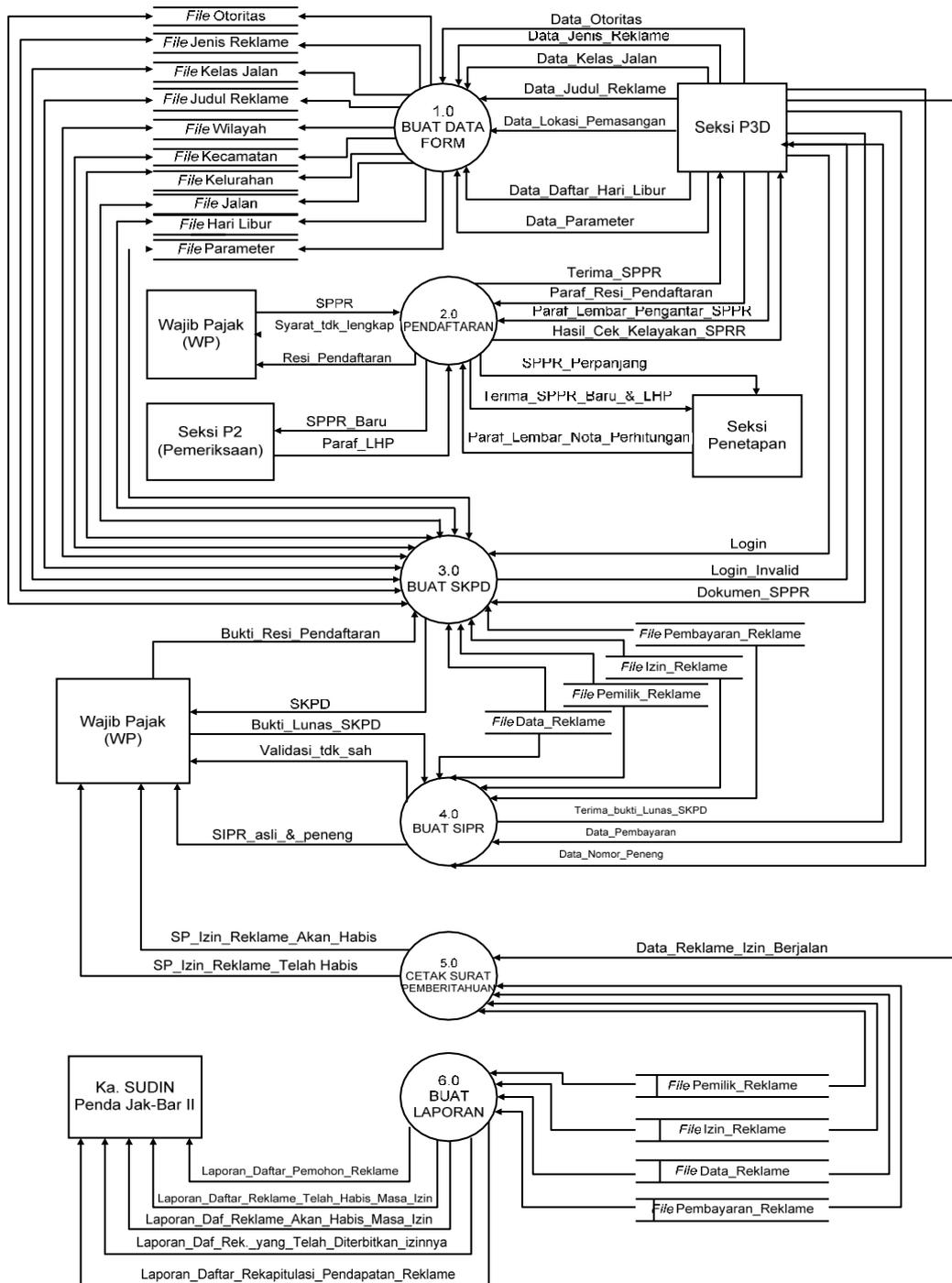
Diagram arus data yang diusulkan ini dibuat untuk mempermudah proses pemasukan dan pengolahan data, sehingga menghasilkan laporan yang akurat.

4. Diagram Konteks



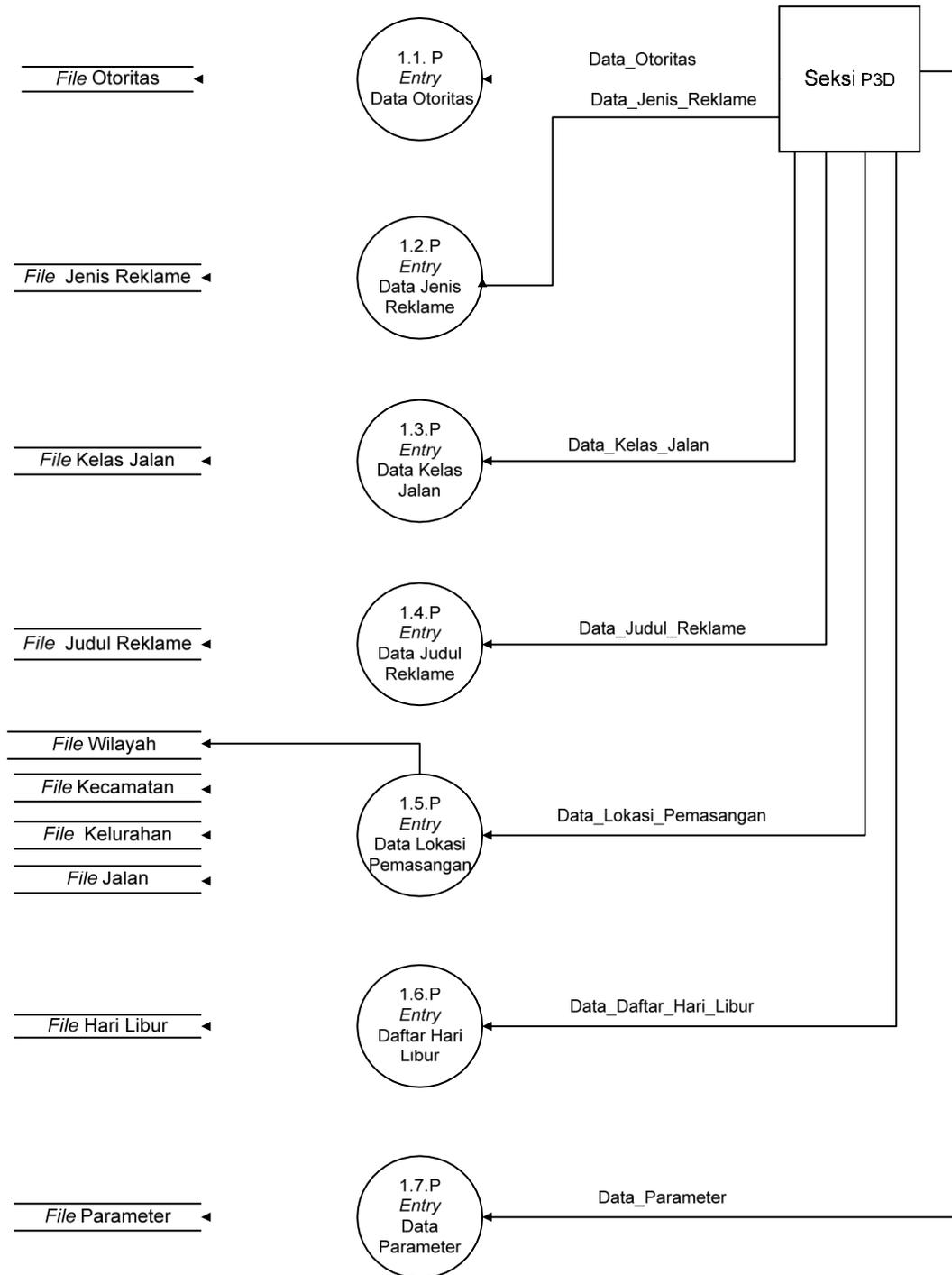
Gambar 4.1. Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan

5. Diagram Nol

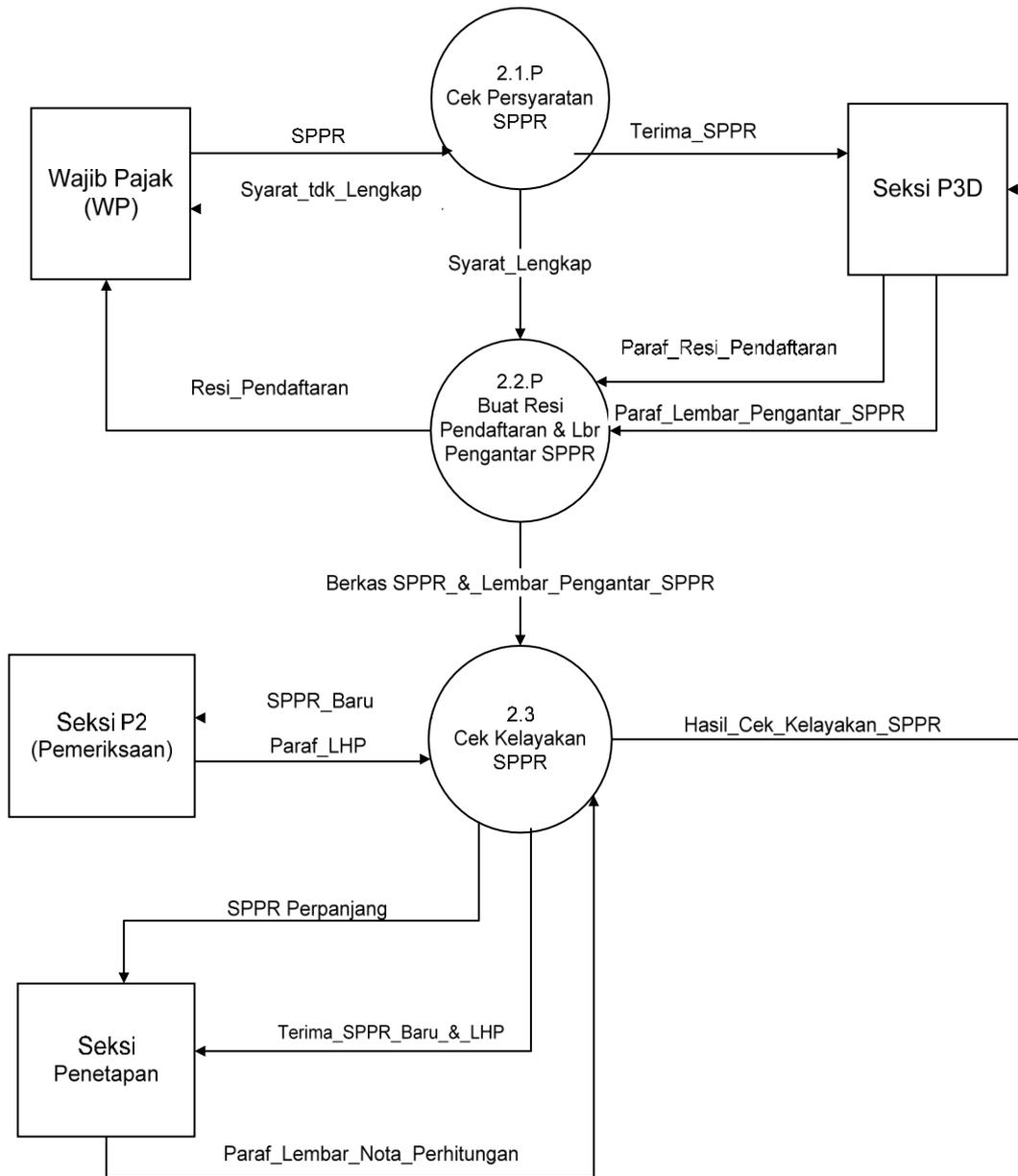


Gambar 4.2. Diagram Nol Sistem yang Diusulkan

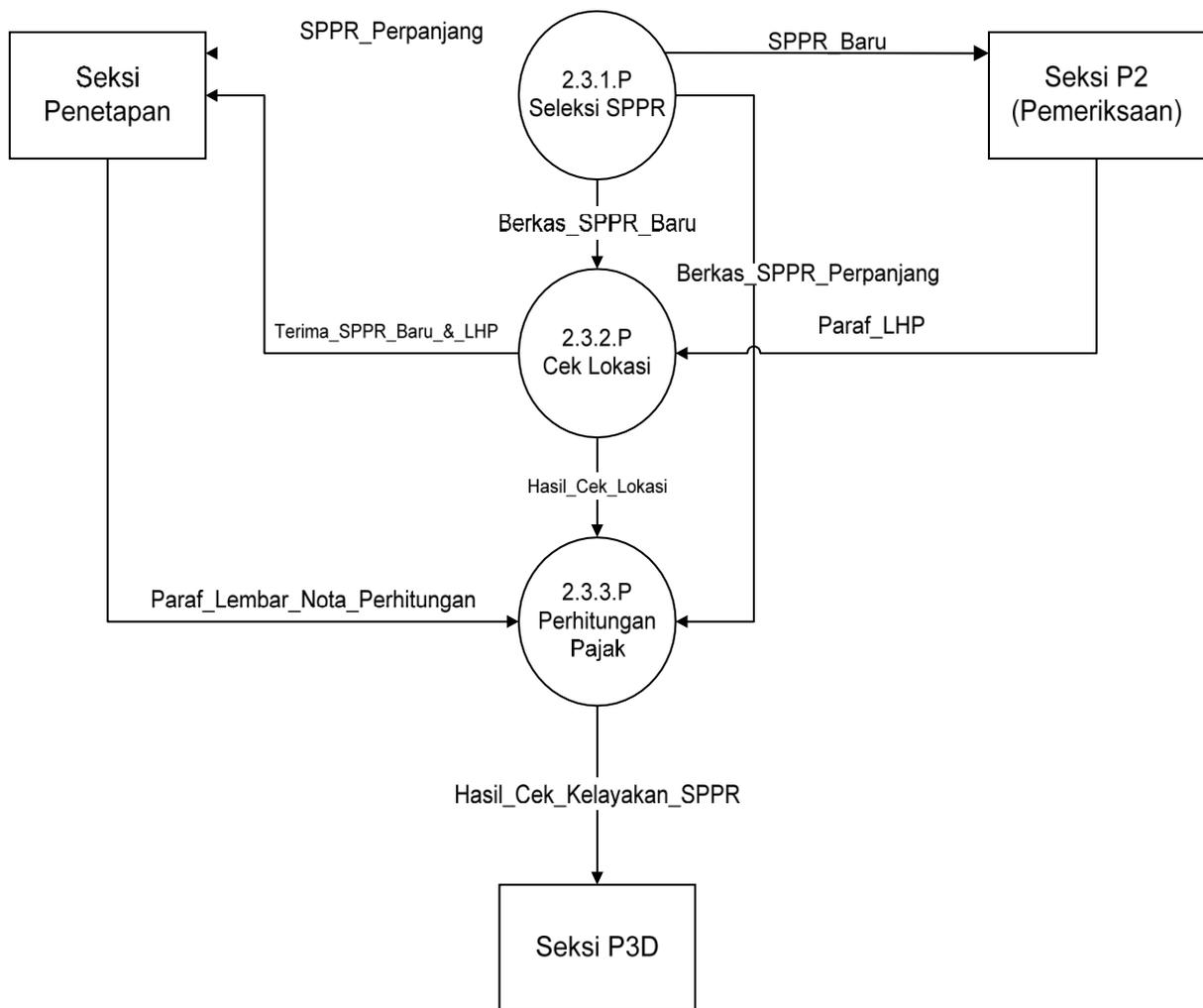
6. Diagram Rinci



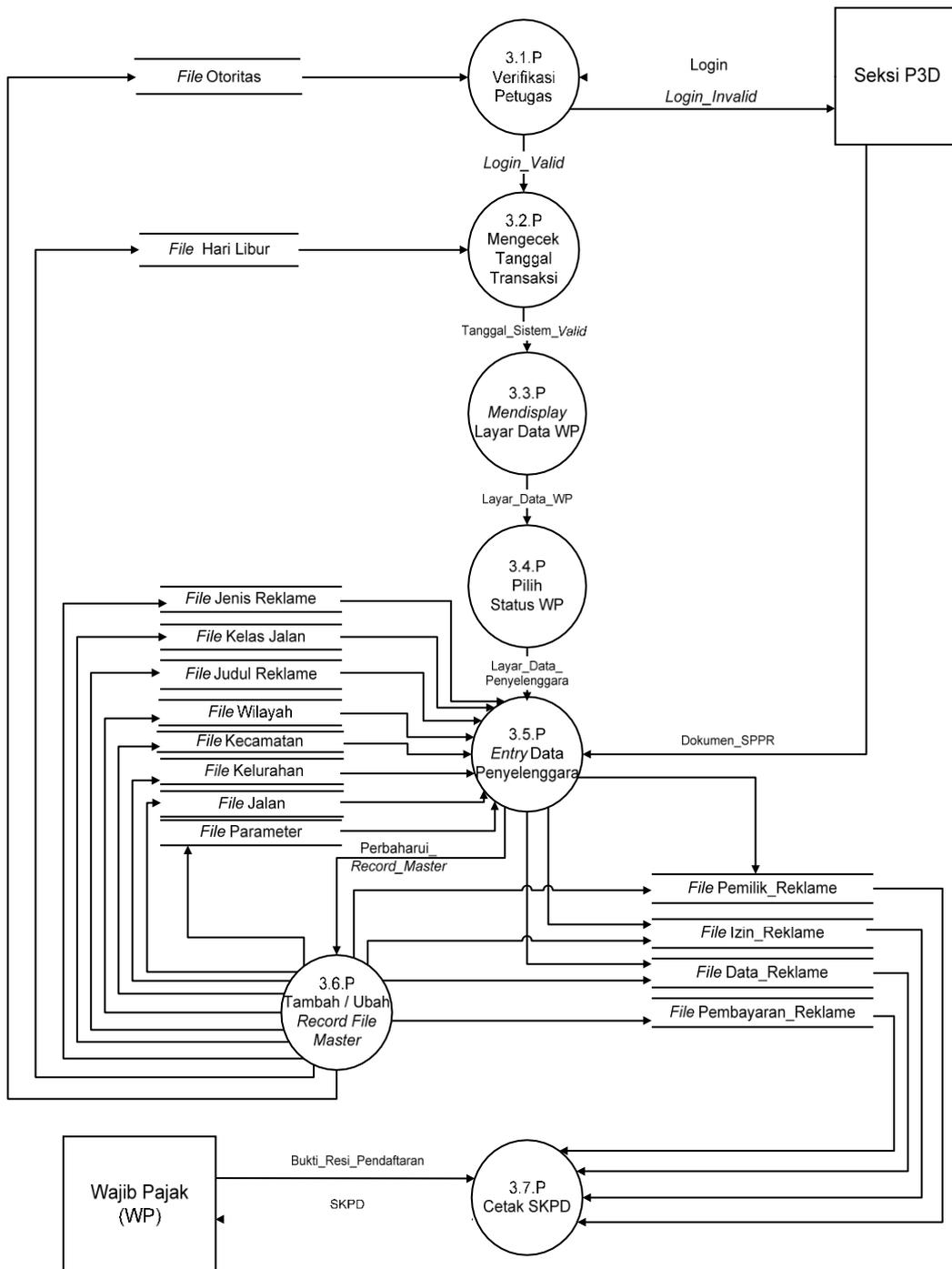
Gambar 4.3. Diagram Rinci – Proses 1.0 Sistem yang Diusulkan



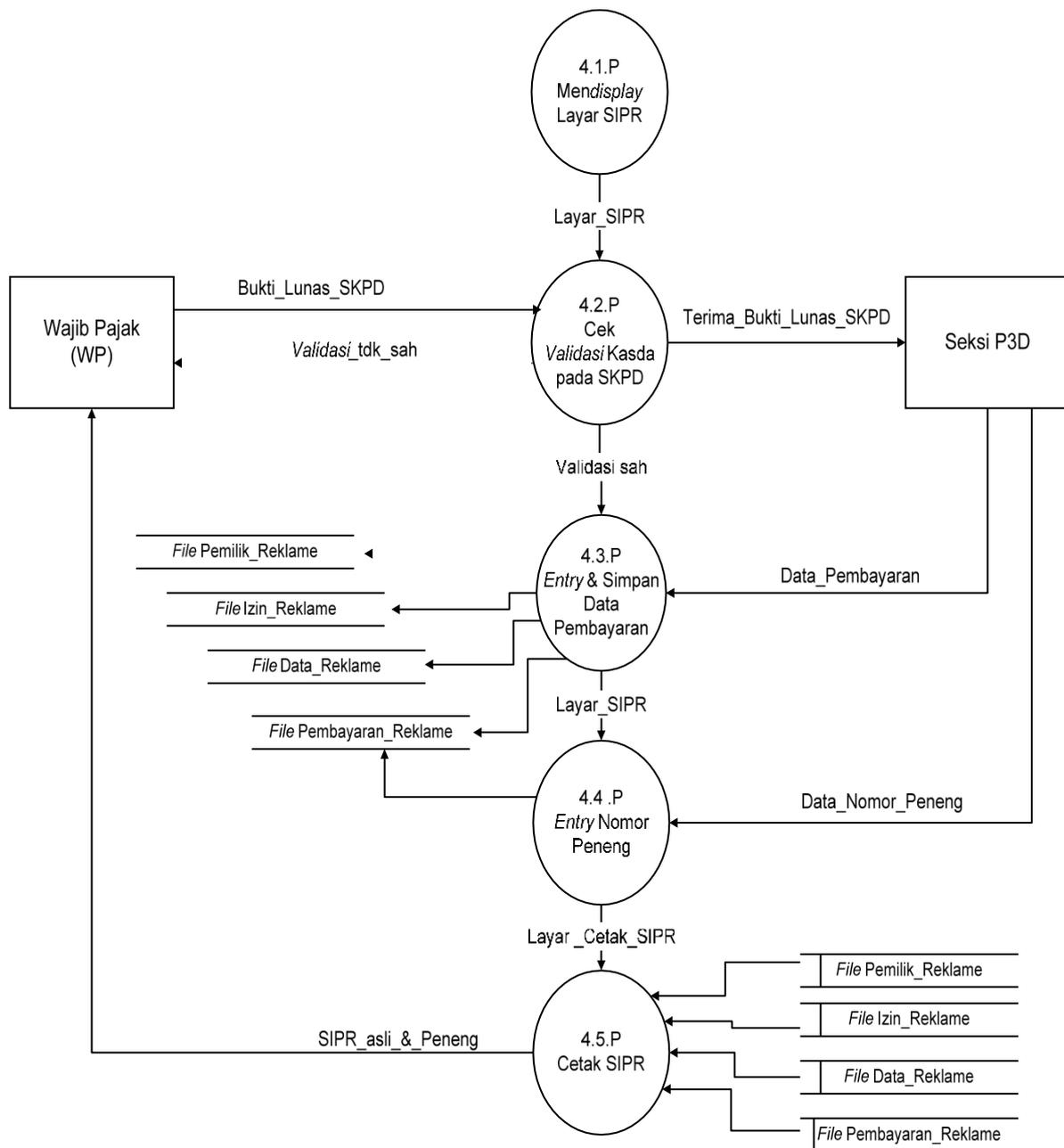
Gambar 4.4. Diagram Rinci – Proses 2.0 Sistem yang Diusulkan



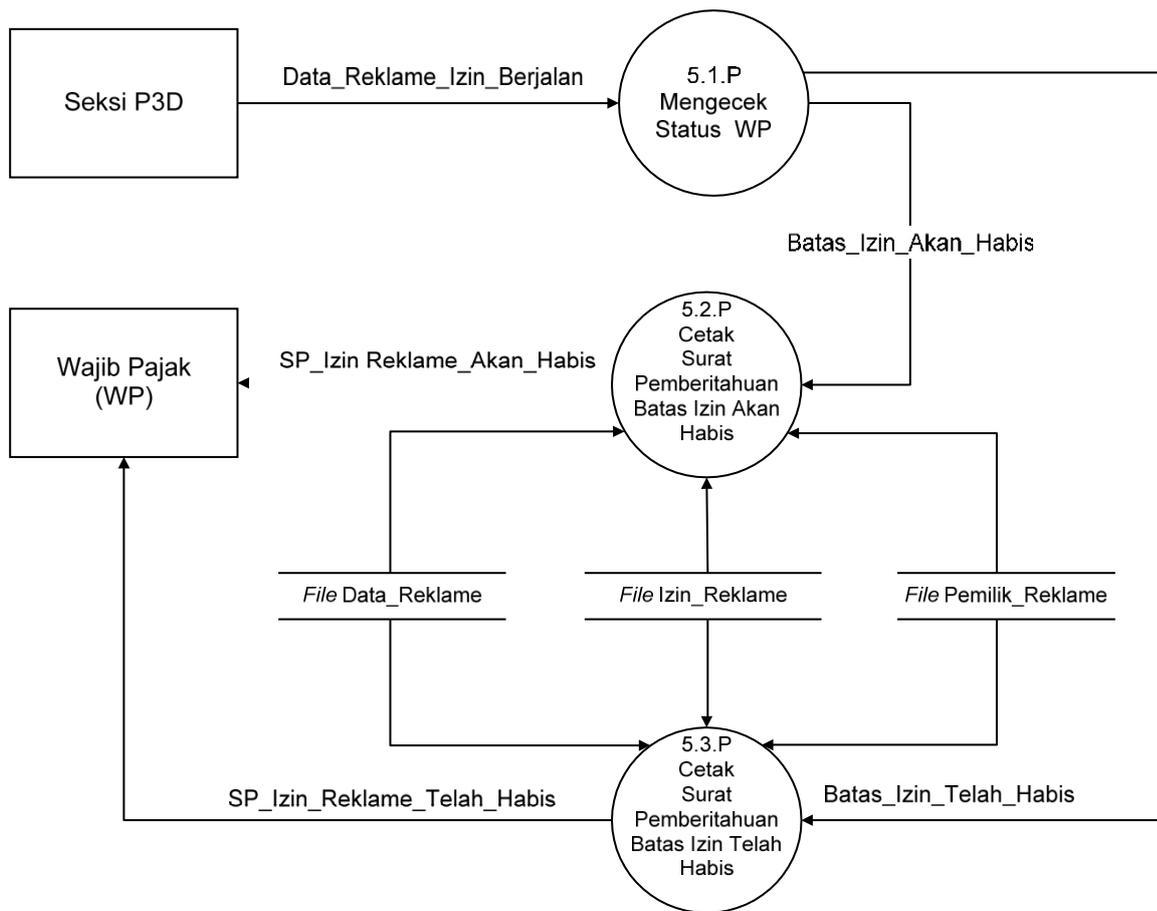
Gambar 4.5. Diagram Rinci – Proses 2.3 Sistem yang Diusulkan



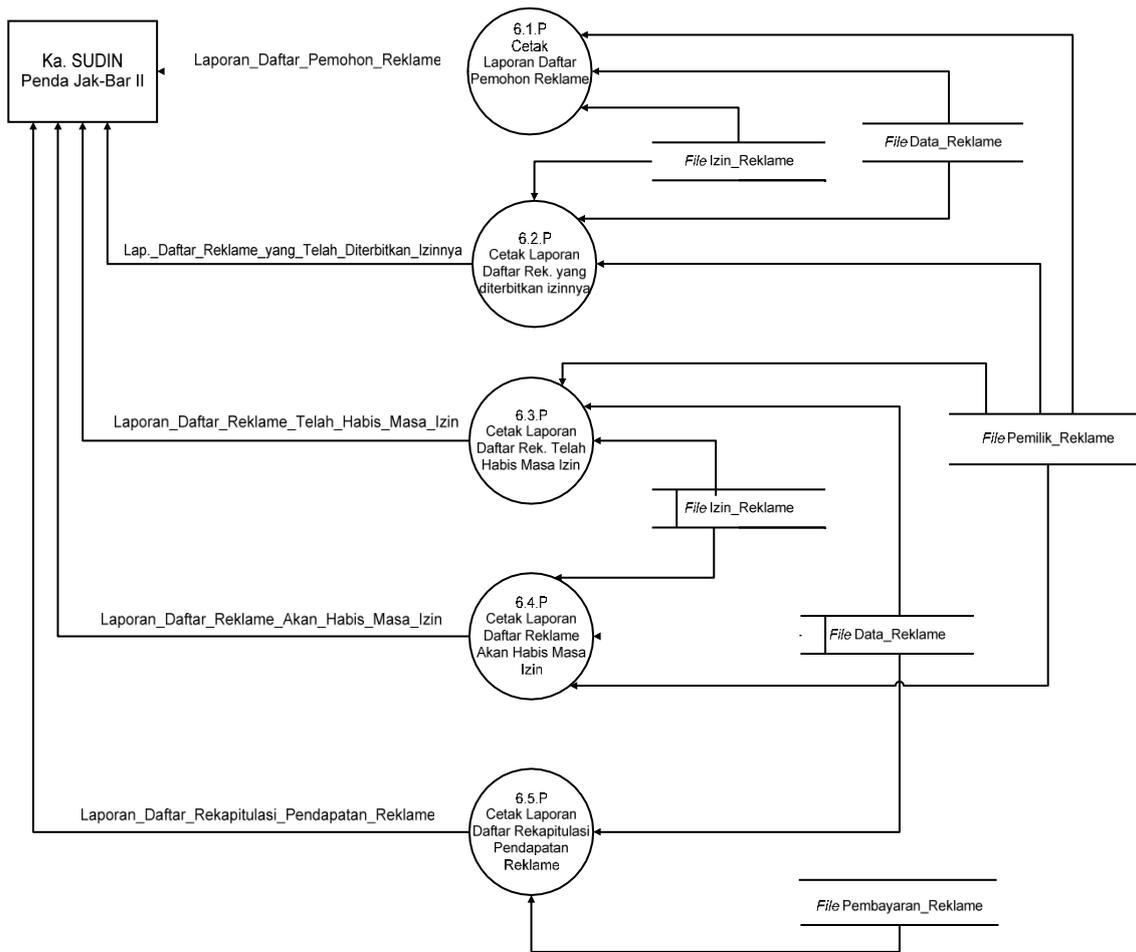
Gambar 4.6. Diagram Rinci – Proses 3.0 Sistem yang Diusulkan



Gambar 4.7. Diagram Rinci - Proses 4.0 Sistem yang Diusulkan



Cambar 4.8. Diagram Rinci 5.0 Sistem yang Diusulkan



Gambar 4.9. Diagram Rinci 6.0 Sistem yang Diusulkan

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan analisis terhadap sistem informasi yang berjalan dan merancang sistem yang diusulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Reklame pada Sudin Penda Wilayah Jakarta Barat II penting diperlukan dalam kegiatan pengadministrasian data, penerbitan surat, dan pembuatan laporan
2. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan seperti *human error* ataupun ketidaksengajaan dapat dikurangi dengan menggunakan sistem komputerisasi
3. Dengan sistem usulan ini, maka jenis pelaporan yang diberikan akan lebih beragam dan pelayanan akan lebih optimal, sehingga akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak yang pada akhirnya akan menambah pendapatan daerah dan negara
4. Usulan Rancangan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Reklame itu memungkinkan pelayanan perizinan yang lebih efektif, sehingga dapat menjamin suatu pelayanan yang baik terhadap wajib pajak serta dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan

Sudin Penda Wilayah Jakarta Barat
II.

Saran-Saran

Beberapa saran yang perlu dikemukakan sehubungan dengan optimalisasi perancangan sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Memasukkan data-data hendaknya dilakukan secara teliti dan disesuaikan dengan peraturan yang ada agar kesalahan dapat dihindari
2. Perlu diadakan pelatihan yang baik dan sistematis dalam rangka penggunaan usulan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Reklame tersebut oleh pengguna yang akan memakai sistem ini
3. Diperlukan personil untuk *maintenance* atau mengawasi masalah yang timbul baik dari sisi *hardware* atau *software*, agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan perusahaan
4. Dilakukan *back-up* secara berkala terhadap data-data penting terutama *file* database pemohon penyelenggara reklame agar dapat mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan
5. Sebaiknya dilakukan evaluasi secara periodik untuk mengetahui apakah sistem telah berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna sistem
6. Kewajiban untuk menempelkan peneng atau tanda lain yang masih berlaku pada reklame hendaknya dilaksanakan dengan tegas dan konsekuen, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta mengawasi adanya reklame tanpa izin (reklame liar) guna dilaporkan kepada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani. (2010). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*.
- Jogiyanto. (1999). *Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*.
- Kendall, Kenneth E & Julie E. Kendall. (2003). *Analisis dan Perancangan Sistem Jilid I. Edisi Bahasa Indonesia*, Terjemahan oleh Thamir Abdul Hafedh Al-Hamdany: PT. Prenhalindo.
- Kristianto, Harianto. (1993). *Konsep dan Perancangan Database*.
- McLeod Jr, Raymon. (1998). *Sistem Informasi Manajemen. Jilid 1. Edisi Ketujuh. Versi Bahasa Indonesia*. New Jersey: Prentice Hall.
- Muljono. (1990). *Prinsip Dasar Manajemen*. Edisi ke 3. Yogyakarta: BPFE
- Sidik. (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. 2002. Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta.
- Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pajak Reklame. 2004. Dipenda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.